

Submitted: 22 Oktober  
2023  
Revised: 20 November  
2023  
Published: 30 November  
2023

## CONTACT

Correspondence Email:  
[nisaulainio708@gmail.com](mailto:nisaulainio708@gmail.com)

Address: Jalan M Yunus  
Lubuk Lintah, Kota  
Padang, Kode Pos: 25153

## KEYWORDS

Women's Education;  
Minangkabau; Ethical  
Politics; Dutch Colonial

## PENDIDIKAN PEREMPUAN DI MINANGKABAU PADA ERA POLITIK ETIS (1901-1942)

NISA ULAINI<sup>1</sup>, SRI HANDAYANI<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup> MAN 1 Pesisir Selatan

## ABSTRACT

The Ethical Politics carried out by the Dutch colonial government towards the Minangkabau people provided great opportunities for the advancement of Minangkabau people's education. One of the striking Dutch policies was education, and this education policy became the core of this colonial policy. Therefore, at the beginning of the 20th century in Minangkabau, there was a movement carried out by several women, one of whom was Rahmah El Yunus. This research is a literature study that uses a philosophical approach and a historical approach. The data sources used are primary and secondary data sources, the primary data in this research are journals, while the secondary data is library materials that have the same studies produced by other thinkers, which discuss Women's Education in Minangkabau in the Era of Ethical Politics. The steps for this research: (1) Heuristics, namely collecting sources. (2) Criticize existing data sources with internal and external criticism. (3) Interpretation which is analyzing data and interpreting it (4) Historiography is writing historical stories in the form of scientific work. The data analysis techniques used in this research are descriptive analysis techniques and content analysis. From the results of this research regarding Women's Education in Minangkabau in the Era of Ethical Politics, there is a women's school in Minangkabau, namely Diniyyah Puteri Padang Panjang which was founded by Rahmah El Yunus. Rahmah El Yunus is very motivated to make Minangkabau women more advanced and intelligent by establishing a special school for women, namely the Diniyyah Putri Padang Panjang school. The importance of education is not only for men, but also for women. A woman who gets an education will be an example for her children and her family.

## ABSTRAK

Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Minangkabau memberikan peluang besar bagi kemajuan pendidikan masyarakat Minangkabau. Salah satu kebijakan Belanda yang mencolok adalah pendidikannya, dan kebijakan pendidikan ini menjadi inti dari kebijakan kolonial ini. Oleh karena itu, di awal abad ke-20 di

Minangkabau, ada gerakan yang dilakukan oleh beberapa wanita, salah satunya adalah Rahmah El Yunus. Penelitian ini merupakan studi literatur yang menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah jurnal, sedangkan data sekunder adalah bahan pustaka yang memiliki studi yang sama yang dihasilkan oleh pemikir lain, yang membahas Pendidikan Perempuan di Minangkabau di Era Politik Etis. Langkah-langkah penelitian ini: (1) Heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber. (2) Kritik sumber data yang ada dengan kritik internal dan eksternal. (3) Interpretasi yang merupakan analisis data dan menginterpretasikannya (4) Historiografi adalah penulisan cerita sejarah dalam bentuk karya ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis konten. Dari hasil penelitian ini mengenai Pendidikan Perempuan di Minangkabau di Era Politik Etis, terdapat sekolah perempuan di Minangkabau, yaitu Diniyyah Puteri Padang Panjang yang didirikan oleh Rahmah El Yunus. Rahmah El Yunus sangat termotivasi untuk membuat perempuan Minangkabau lebih maju dan cerdas dengan mendirikan sekolah khusus untuk perempuan, yaitu sekolah Diniyyah Putri Padang Panjang. Pentingnya pendidikan bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Seorang perempuan yang mendapatkan pendidikan akan menjadi contoh bagi anaknya dan juga keluarganya.

## I. PENDAHULUAN

Minangkabau, sebagai salah satu suku di Indonesia memiliki prinsip kekerabatan matrilineal descen yang memengaruhi struktur masyarakat, di mana hubungan kekerabatan diatur melalui garis ibu (Refisrul & Ajisman, 2015). Dalam Perkembangannya, peran perempuan minangkabau terus mengalami pergeseran dari masa ke masa. Pada masa kolonialisme Belanda, peran perempuan Minangkabau terbatas pada rumah tangga dan tradisi rumah gadang. Wanita diidentifikasi sebagai "limpapeh rumah nan gadang" yang banyak dituntut di dalam rumah gadang. Namun, pada era kontemporer, perempuan Minangkabau telah melampaui peran tradisional dan terlibat dalam berbagai sektor publik, menunjukkan pergeseran signifikan dalam peran dan kontribusi mereka dalam masyarakat (Wahyuni & Simatupang, 2024).

Dalam sejarah pendidikan Minangkabau, terlihat bahwa pada masa kolonialisme pendidikan lebih berfokus pada laki-laki. Perempuan menghadapi keterbatasan dalam menentukan pilihan pendidikan mereka, dengan kebebasan pendapat yang terbatas hingga mereka mencapai kedudukan tertentu, seperti Bundo Kandung (Nasution et al., 2022). Pandangan patriarki pada masa kolonialisme menyebabkan perempuan di Minangkabau dan di banyak negara lain menghadapi diskriminasi gender dan keterbatasan dalam berbagai sektor kehidupan. Wanita dianggap memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan pria, membatasi akses mereka dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik (Rokhmansyah,

2016). Namun, Seiring dengan diberlakukannya politik etis Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam pendidikan di Minangkabau. Program pendidikan yang didukung oleh politik etis memberikan peluang pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi, termasuk perempuan.

Politik Etis Belanda memberikan dorongan terhadap perkembangan pendidikan di Minangkabau. Program pendidikan tersebut memberikan peluang pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi, termasuk perempuan. Hal ini membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan menjadi landasan bagi pergerakan politik menuju kemerdekaan (Yati, 2017). Keterkaitan antara politik etis dan pendidikan perempuan di Minangkabau pada periode tersebut menjadi fokus penelitian yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana politik etis memengaruhi pendidikan perempuan di Minangkabau, serta dampaknya terhadap peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan (Susilo & Isbandiyah, 2018).

Selama periode politik etis, ada perubahan signifikan dalam pola pikir dan perasaan individualisme pada elit baru Indonesia yang berpendidikan Barat. Hal ini berdampak pada peningkatan martabat mereka dan mengurangi kekuasaan tata pemerintahan pribumi, termasuk di Minangkabau (Putri, 2022). Peran perempuan dalam pergerakan politik kemerdekaan juga mulai terlihat. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dan kesetaraan mulai muncul, seiring dengan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa (Remiswal et al., 2021).

Penelitian tentang peran politik etis dalam pendidikan perempuan di Minangkabau penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada. Kajian tentang pendidikan perempuan masih minim dibandingkan dengan penelitian tentang pendidikan umum, sehingga perlu untuk lebih memahami sejarah dan pengaruh politik etis terhadap pendidikan perempuan di Minangkabau (Yati, 2017).

Dari konteks tersebut, penelitian tentang keterkaitan antara politik etis dan pendidikan perempuan di Minangkabau pada periode tersebut menjadi relevan dan penting untuk mendalami sejarah pendidikan dan peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Berdasarkan uraian permasalahan dan alasan yang dikemukakan tersebut ditulislah sebuah artikel dengan tajuk “Pendidikan Perempuan di Minangkabau Pada Era Politik Etis (1901-1942)”. Melalui artikel ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan yang lebih dalam antara politik etis dan perkembangan pendidikan perempuan di Minangkabau. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana politik etis memengaruhi dinamika sosial dan pendidikan di wilayah tersebut pada periode kolonial.

## II. METODE

Penelitian penulis ini merupakan kajian studi pustaka dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: Metode Sejarah yang meliputi Langkah-langkah penelitian seperti Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi dan Historiografi. Kemudian menggunakan Metode *content analysis*, yaitu data yang dikumpulkan adalah data-data yang bersifat *deskriptif tekstual*. Metode *induktif*, analisis data berangkat dari data *empiric* lewat observasi menuju teori. dan metode *deduktif*, metode analisis data berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu data dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada data tertentu yang berciri sama dengan data yang bersangkutan (Harahap, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kumpulan karya Harun Nasution. Sumber sekunder berupa karya ilmiah hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun dalam bentuk lainnya yang mendeskripsikan tentang Pendidikan Perempuan Minangkabau. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research* (penelitian pustaka). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *induktif* dengan mengacu pada permasalahan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perkembangan Pendidikan Perempuan di Minangkabau pada Era Politik Etis**

#### *Gagasan Tentang Politik Etis*

Perdagangan kolonialisme Belanda akibat tanam paksa mengalami kemajuan pesat. Kolonialisme Belanda di Indonesia tahun 1870-1900 telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia (Alinur, 2016). Berbagai kebijakan yang diterapkan Belanda terhadap bangsa Indonesia selalu menguntungkan sepihak, yakni Belanda itu sendiri, Cina, dan Eropa pada umumnya. Situasi demikian menyebabkan munculnya kritikan terhadap pemerintahan maupun daerah jajahan Hindia Belanda. Kritikan ini pada dasarnya adalah tentang sistem kolonialisme yang menguntungkan sepihak saja, sedangkan penduduk setempat hidup dalam kemelaratan (Niel, Van Robert, 1984:1).

Harapan dan prediksi menjelang akhir Liberalisme tentang sistem ekonomi tidak membawa kemakmuran kepada bangsa Indonesia. Keadaan ini menyebabkan rasa ketidakpuasan sehingga menimbulkan pergolakan. Akibatnya, Belanda menerapkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis (Niel, Van Robert, 1984:2).

Pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda, sudah pasti, tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik etis menuntun bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Tidak ada tekad baik dan keikhlasan hati yang

tulus untuk melaksanakannya. Mereka berbuat demikian karena takut kritik dan takut kalau tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus menerus akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus menerus (Daliman,2012:24).

Salah satu program politik Etis memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat colonial adalah *Edukasi*. *Edukasi* pendidikan dinilai sebagai jalan satu satunya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib rakyat, karena dengan adanya perbaikan pendidikan maka nasib rakyat akan menjadi lebih baik (Saifudin Zuhri, 2010:45). Namun pengajaran disekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukan untuk anak laki laki, sedangkan untuk anak perempuan hanya memperoleh pendidikan dirumah dan dilingkungan keluarga. Anak perempuan dididik hanya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tagngga, mereka diharuskan untuk belajar memasak, menjahit, dan membatik yang merupakan rutinitas di rumah (Suhartono, 2001:27).

Pada 17 September 1901 Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina (18901948) mengumumkan mengenai suatu penyelidikan tentang taraf kesejahteraan masyarakat yang berada Jawa. Isi pidato dari Ratu Belanda yaitu “sebagai negara Kristen, Nedherland berkewajiban di Kepulauan Hindia-Belanda untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi, memberikan jalan yang tegas, serta meresapi keseluruhan tingkah laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Netherland mempunyai meringankan beban bangsa Indonesia dengan adanya kebijakan politik etis pada daerah ini. Berhubungan dengan itu, kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan selama bertahun-tahun. Politik Etis dimulai secara resmi setelah pidato dari Ratu Belanda dan merupakan pertanda bagi dimulainya zaman baru bagi masyarakat Indonesia (Agus Susilo, 2018: 407). Pada abad ke-19 sebagian orang Belanda sudah mulai prihatikan terhadap kesejahteraan dan status masyarakat pribumi.Mereka kemudian melakukan usaha-usaha secara pribadi untuk perbaikan keadaan.Orang-orang yang berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran Hindia-Belanda.

*Pertama*, K. E. Holle merupakan seorang yang membantu langsung dalam bidang pertanian kepada orang Sunda dan berusaha untuk memperbaiki keadaan negeri dan penduduk Hindia-Belanda. *Kedua*, C. Snouck Hurgronje merupakan penasihat yang berhubungan dengan soal-soal pribumi.Beliau merupakan orang yang telah menguasai pengetahuan mengenai kehidupan dan adat kebiasaan penduduk Jawa pada tahun 1890.Beliau juga memberikan konsep tentang memberikan pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk.Untuk pendidikan yang pada awalnya hanya untuk kaum priyayi, namun karena adanya kebutuhan birokrasi yang semakin meningkat, maka banyak anak priyayi rendah dan bahkan orang biasa dapat masuk pendidikan Barat di Hindia-Belanda (Indonesia). *Ketiga*, W.P.D. de Wolff van Westerode yang meletakkan dasar-dasar pengorganisaian Bank Kredit untuk Simpan Pinjam dan Pertanian yang mengadakan perlindungan terhadap hutang-hutang (Niel, R.V,1984:. 54). Di bawah Abendanon, politik etis yang memberikan pendidikan bergaya eropa dan pemakaian

bahasa Belanda lebih diutamakan. Pada tahun 1900, tiga *hoofdensholen* Sekolah para kepala yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi Sekolah-Sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintah dan diberi nama baru OSVIA (*Opleidingschole voor inlandsche ambtenaren*, Sekolah pelatihan untuk pejabat pribumi).

Pejabat pribumi di *Sekolah* di bimbing dan diajari cara melaksanakan kewajiban dalam birokrasi pemerintahan nantinya. Masa pendidikannya berlangsung 5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah rendah Eropa (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017:45). Penduduk pribumi hanya berkaitan dalam proyek-proyek infrastruktur saja. Dimana mempunyai kaitan lebih langsung dengan kesejahteraan adalah proyek-proyek pengairan yang diupayakan pemerintah namun tidak selalu berhasil. Pemerintah Belanda memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur Jenderal atau dewan pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda.

Pendidikan pada masa kolonial mendukung politik Etis menyetujui ditingkatkannya dunia pendidikan bagi bangsa Indonesia dan pemeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia atas Hindia Belanda. Para tokoh Belanda yang mendukung politik etis mengupayakan supaya politik etis terealisasi bagi rakyat Indonesia. Pendekatan elitis diharapkan dapat memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejahteraan. Tak satu kebijakan dijalankan dengan dana yang cukup memadai, dan tak satu pun menghasilkan apa yang diinginkan oleh para pendukungnya (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017:186).

*Kebijakan Pemerintah Belanda dalam politik Etis*

#### **a. Ekonomi**

Hasil politik etis dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sistem yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda, diantaranya yaitu dalam bidang pengairan, pengairan yang baik sangatlah vital bagi pertanian dan perkebunan. Tanpa adanya pengairan yang baik, keberlangsungan perkebunan dapat terancam. Sebagai bentuk balas budi, ide irigasi ditujukan untuk masyarakat pribumi supaya dapat mengurus perkebunannya, dengan lancarnya perkebunan dan pertanian, masyarakat pribumi dapat memperbaiki perekonomian dan kehidupan mereka dengan baik ((Niel, R.V, 1984: 58).

Perbaikan sistem pertanian adalah bagian dari pelaksanaan politik etis, karena bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pribumi, salah satu bentuk dari perbaikannya yaitu program peningkatan pertanian, disebut juga dengan sistem irigasi. Perbaikan sistem irigasi ini merupakan perhatian utama oleh pemerintahan setempat (Mudji Hartono, 2012:42)

Suatu rencana yang akan diupayakan dalam mengalirkan sungai harus diabaikan setelah melalui perjalanan panjang padahal telah menelan dana sekitar 17 juta gulden.

Meskipun demikian, luas kawasan persawahan yang dapat diairi di Padang Panjang antara tahun 1885 dan 1930 meningkat sekitar 1,8 kali lipat. Arti pentingnya dapat dilihat pada perspektif jumlah penduduk yang juga meningkat dengan jumlah yang kira-kira sama dalam periode yang sama. Pemerintah kolonial Belanda gagal membuat kebijakan yang dapat mendorong industrialisasi di Indonesia (Ricklefs, M.C, 2007: 175).

#### **b. Sosial**

Setelah mengetahui bahwa politik etis tidak jauh berbeda dengan bentuk kolonialisme dan imperialisme, maka dapat dikatakan politik etis merupakan bentuk imperialis bentuk baru yang mengandung unsur perluasan daerah dan penanaman modal lebih (Suprayitno: 14).

Mengenai pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dapat diketahui dari munculnya golongan elite birokrasi Belanda yang semakin nyata mengabaikan nilai-nilai lama yang diberikan oleh para priyayi lebih banyak kelonggaran dalam pemerintahan. Sehingga pada saat politik etis ini masyarakat pribumi banyak muncul sikap yang meninggalkan budaya timur yang sudah lama hidup dalam hubungan bermasyarakat, misalnya dalam tata pergaulan sopan santun.

Diantara yang terjadi penyimpangan sosial budaya di era politik etis ini antara lain,

- 1) Membedakan warna kulit (*color line*)
- 2) Menjadikan tanah jajahan sebagai tempat memenuhi kebutuhan ekonomi negeri induk.
- 3) Perbaikan sosial yang sedikit.
- 4) Jarak sosial yang sangat jauh antara penjajah dengan terjajah (Lerissa, 1990:21).

#### **c. Pendidikan**

Ketika Politik Etis dimulai sudah terdapat beberapa sekolah yang menyelenggarakan praktik pendidikan, seperti sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, ELS, HCS, dan HBS. Secara umum penyelenggaraan pendidikan yang ditandai dengan pembukaan sekolah bagi pribumi merupakan proses kelanjutan dan respon dari praktik pendidikan yang telah dimulai sebelumnya. Dengan munculnya ide-ide pembaharuan dan menimbulkan dorongan akan pentingnya pendidikan, maka pemerintah kolonial mengizinkan pembukaan beberapa sekolah.

Peluasan akses pendidikan tidak dibarengi penghapusan segregasi dan diskriminasi yang membatasi kesempatan warga pribumi. Misalkan saja di ELS, pendirian sekolah ini berawal dari masalah atas ketidakinginan orangtua anak Belanda untuk mencampurkan anaknya dengan anak golongan rendah, karena pada saat itu terdapat sekolah bermutu rendah karena guru yang kurang kompeten dan murid yang berlatar belakang tidak baik (Nasution, 1983:92). Ketidakinginan tersebut mengharuskan para orang tua mengirimkan anaknya ke Negeri Belanda sehingga didirikanlah ELS pada 1883.

Lebih lanjut mengenai HIS, HIS dimaksudkan sebagai *standenschool*, sekolah yang berdasarkan stus. Berdasarkan ketentuan pemerintah, ada empat penilaian yang memungkinkan orangtua mengirimkan anaknya ke HIS, yaitu keturunan, jabatan, kekayaan, atau pendidikan. Penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa di HIS saja masih terdapat penggolongan berdasarkan empat penilaian tadi. Pada umumnya pendidikan digunakan pribumi sebagai sarana untuk mobilitas sosial ke yang lebih baik. Pekerjaan dan pencerahaan pengetahuan gaya barat menjadi daya tarik untuk bisa mendapat “tempat” yang lebih baik.

Pendidikan sebagai media untuk menggapai modernitas bagi pribumi semakin dipersulit dengan dibuatnya kebijakan politik pendidikan (akan di jelaskan lebih lanjut). Permasalahan ini dijumpai pada ELS yang sedianya didirikan untuk memberi pendidikan bagi anak Belanda dan mereka yang disamakan statusnya bangsawan pribumi. Menghadapi rintangan dan tantangan untuk bersekolah di ELS. Kasus tersebut dialami oleh Wage Rudolf Supratman yang diterima di kelas tiga ELS Makassar, dan beberapa bulan setelahnya ia dikeluarkan karena ia bukan anak kandung Sersan Willem van Eldik (Saudara iparnya yang berdarah Belanda) (Muhammad Fakhriansyah, 2019:134)

Akan tetapi, penerimaan anak-anak pribumi merupakan masalah yang rumit dan panjang akibat dari dinamika situasi politik yang berubah-ubah Kesulitan akses tersebut nyatanya tidak menolak keseluruhan anak pribumi, tetapi diseleksi berdasarkan berapa banyak dan siapa anak Indonesia yang diterima (darimana mereka berasal). Sesuai dengan kebijakan politik pendidikan saat itu, penerimaan anak pribumi dibolehkan asalkan jumlah muridnya kurang dari jumlah anak Belanda.

Kesempatan belajar bagi anak pribumi tidak sebaik anak bangsa lain. Pendidikan barat yang relatif mahal bagi orang pribumi membuat para orang tua harus merogoh kocek yang dalam untuk pendidikan. Belum lagi sekolah Belanda pada umumnya terdapat di kota besar sehingga menyebabkan perlunya dikerluakan uang untuk transportasi dan penginapan (Muhammad Fakhriansyah, 2019:137).

### **Diniyah Putri Padang Panjang Sebagai Lembaga Pendidikan Perempuan di Minangkabau pada masa Politik Etis**

#### **a. Awal Berdirinya Diniyah Putri Padang Panjang**

Setelah diberlakukannya Politik Etis di Indonesia, salah satu daerah yaitu Minangkabau memiliki dampak positif terhadap pendidikan perempuan. Sebelum adanya Politik Etis ini perempuan di Minangkabau sama sekali tidak menjajah ke arah pendidikan yang formal.

Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas pendidikan agama dan pendidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang istri dan ibu. Pola dan tingkah laku perempuan sangat dikendalikan dan di batasi oleh adat istiadat yang dianut oleh

masyarakatnya. Dalam hal ini perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dan kesandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan kepada “apa yang boleh” dan “tidak dibolehkan” mereka lakukan dalam pandangan adat dan kebiasaan (Risa Marta Yanti, 2017: 149). Sehingga ketika lahirnya politik etis ini, memberikan peluang kepada perempuan di Minangkabau dalam menempuh pendidikan.

Pendidikan terbukti menjadi faktor yang paling fundamental dalam merangsang munculnya pergerakan perempuan. Karena itulah gerakan feminis pertama di Minangkabau abad ke-20 bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan-perempuan terpelajar yang lahir dari sekolah modern menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan kemajuan bagi kaumnya. Mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan dan sekolah keterampilan yang tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana mengatur rumah tangga yang baik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk baca-tulis dan berhitung dalam huruf Latin. Rahmah El Yunusiyah merupakan salah satu pelopor dari gerakan kemajuan perempuan Minangkabau melalui pendidikan, Rahmah El Yunusiyah juga pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang pada tanggal 1 November 1923 (Risa Marta Yanti, 2017: 153).

Sebelum didirikannya Diniyyah Puteri Padang Panjang, pendidikan didapatkan oleh kaum perempuan Minangkabau hanya sebatas pendidikan agama dan pendidikan kerumahtanggaan sebagai bekal untuk menjadi seorang istri dan ibu. Pola dan tingkah laku perempuan sangat dikendalikan dan di batasi oleh adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam hal ini perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dan kesandirian dalam merepresentasikan dirinya seperti yang mereka inginkan, namun lebih dominan kepada “apa yang boleh” dan “tidak dibolehkan” mereka lakukan dalam pandangan adat dan kebiasaan (Risa Marta Yanti, 2017: 149). Sehingga ketika lahirnya politik etis ini, memberikan peluang kepada perempuan di Minangkabau dalam menempuh pendidikan.

Pendidikan terbukti menjadi faktor yang paling fundamental dalam merangsang munculnya pergerakan perempuan. Karena itulah gerakan feminis pertama di Minangkabau abad ke-20 bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan-perempuan terpelajar yang lahir dari sekolah modern menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan kemajuan bagi kaumnya. Mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan dan sekolah keterampilan yang tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana mengatur rumah tangga yang baik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk baca-tulis dan berhitung dalam huruf Latin. Rahmah El Yunusiyah merupakan salah satu pelopor dari gerakan kemajuan

perempuan Minangkabau melalui pendidikan, Rahmah El Yunusiah juga pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang (Risa Marta Yanti, 2017: 153).

Permulaan abad ke-20 pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan masih sangat pendek, terutama di alam Minangkabau yang terkenal kuat adatnya. Namun perguruan Diniyah Putri Padang Panjang berdiri, karena ia bermodalkan cita-cita dan keyakinan yang kuat akan kebenaran yang di kerjakannya. Perguruan ini telah memelopori pendidikan agama Islam yang “khusus untuk perempuan” dengan memakai sistem pendidikan modern seperti yang di kenal dalam dunia pendidikan, baik di Timur maupun Barat. Perguruan Diniyah ini lahir tepat pada saat sejarah menghendaknya, yaitu di saat bangsa Indonesia haus akan perubahan untuk perbaikan nasib bangsa dalam segala bidang, terutama kaum perempuannya. Apalagi waktu itu kaum perempuan tidak sebebaskan sekarang dalam menuntut ilmu pengetahuan, apalagi untuk meninggalkan kampung halaman. (Syilvia Syasmi, Bachtiar Akob: 242)

Keyakinan Rahmah akan peranan pendidikan sebagai salah satu jalan yang tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan telah dimilikinya sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Rahmah berkeinginan untuk mendirikan perguruan agama khusus untuk perempuan. Paling tidak ada tiga faktor yang mendorong niat Rahmah untuk mendirikan perguruan yang khusus untuk perempuan. Ketiga faktor tersebut sebagai berikut:

Pertama, keterbelakangan kaum perempuan dalam bidang pendidikan Menurut Rahmah, masyarakat akan baik melalui rumah tangga, sebab rumah tangga adalah tiang masyarakat dan masyarakat tiang suatu negara. Sebab itu Rahma menginginkan melalui pendidikan, setiap perempuan menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga, masyarakat dan sekolah. Tujuan ini akan dapat dicapai apabila kaum perempuan mendapat pendidikan khusus dengan sistem pendidikan tersendiri. Rahmah melihat bahwa hukum agama sangat erat sangkut pautnya dengan seluk beluk keperempuanan. Maka ia berkesimpulan bahwa perlu ada sebuah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak perempuan. Rahmah bercita-cita memperbaiki kedudukan kaum perempuan melalui pendidikan modern berdasarkan prinsip agama. Mengangkat derajat kaum perempuan tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Hal itu harus dikerjakan sendiri oleh kaum perempuan, karena kaum perempuan sendirilah secara langsung yang dapat menghargai dirinya (Ajisman, 2002: 43-44).

Kedua, Rahmah merasa tidak puas dengan ilmu yang diterimanya, baik di sekolah kakaknya maupun pengajian di Surau Jembatan Besi yang membahas masalah perempuan. Selama Rahmah mengikuti pelajaran secara resmi di sekolah kakaknya, Diniyah School, ketidakpuasannya ini berpokok pangkal kepada materi pelajaran yang disajikan. Walaupun Diniyah School termasuk sekolah agama yang dianggap modern di kala itu, namun dalam

menyajikan materi pelajaran agama yang menyangkut masalah perempuan tidak dibahas secara mendalam.

Demikian pula pengalamannya bersama tiga orang temannya Rasuna Said, Upik Djapang dan Nanisah, ketika mereka mengikuti pengajian di Surau Jembatan Besi. Pertanyaan yang mereka ajukan kepada guru-guru mengenai perempuan kurang mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya Rahmah berkesimpulan bahwa tampaknya guru laki-laki tidak terbuka dalam membahas masalah agama yang berkaitan dengan perempuan, apalagi dengan mencampurbaurkan antara murid laki-laki dengan murid perempuan dalam satu kelas dengan sistem edukasi. Agar murid-murid perempuan mendapat pelajaran yang luas mengenai perempuan dalam Islam, perlu adanya sebuah lembaga pendidikan yang murid-muridnya seluruhnya perempuan (Ajisman,2002:44).

Ketiga, Rahmah melihat bahwa yang menjadi ulama hanyalah laki-laki belaka, mengapa kaum perempuan pada waktu itu tidak ada satu pun yang tampil menjadi juru dakwah, apakah agama Islam melarang mereka tampil di depan umum untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Padahal di sisi Allah manusia itu sama, hanya yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila keadaan kaum perempuan seperti demikian dibiarkan berlanjut terus dan tidak dicarikan jalan pemecahannya, maka kaum perempuan makin lama makin tertinggal kemajuannya dari kaum laki-laki.

Keluhan yang dirasakan Rahmah ini dibicarakannya kepada teman- temannya yang tergabung dalam organisasi PMDS (Persatuan Murid-Murid Diniyah School) bagian putri yang diketuai oleh Rahmah sendiri. Begitu juga dengan kakaknya Zainuddin Labay El Yunusy, mereka sudah berulang kali mendiskusikan mengenai cita-citanya untuk mendirikan sebuah perguruan agama yang khusus untuk anak-anak perempuan. Pada tahun 1923 cita-citanya kembali dibicarakan dengan kakaknya. Maka kakaknya mengajukan sebuah pertanyaan "apakah Rahmah telah sanggup untuk mendirikan sekolah putri yang dicita-citakan itu". Atas pertanyaan tersebut, Rahmah menjawab dengan tegas bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran yang dimilikinya. Dengan jawaban tersebut, kakaknya memberikan persetujuan kepada Rahmah untuk mendirikan sekolah khusus perempuan.

Selanjutnya persetujuan kakaknya dikemukakan Rahmah kepada kawan- kawannya yang duduk dalam kepengurusan PMDS bagian putri. Ternyata teman-temannya mendukung dengan segala risiko yang akan terjadi. Pada tanggal 1 Nopember 1923 berdirilah sekolah agama putri di Padang Panjang dengan jumlah murid putri lebih kurang 71 orang. Perguruan ini mula-mula diberi nama "Al-Madrasatul Diniyah Lil Banat" yang kemudian lebih dikenal dengan nama "Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang". Pada masa penjajahan Belanda perguruan ini dikenal juga dengan nama "*Diniyyah School*

Putri". Tetapi, masyarakat Padang Panjang memberi nama dengan "Sekolah Etek Rahmah" atau "Sekolah Menyesal". Penamaan ini berdasarkan rasa penyesalan mereka tidak belajar pada masa lampau, sehingga tidak tahu tulis baca (Ajisman,2002:45).

Lebih kurang tiga tahun pertama berdirinya perguruan ini, yaitu antara tahun 1923-1926, Rahmah menitikberatkan pendidikannya kepada pemberantasan buta huruf di kalangan kaum ibu yang sudah berumah tangga, disamping mempelajari Tauhid, Fiqih Hadist dan lain-lain. Dalam perkembangannya murid-murid selalu bertambah, terutama gadis-gadis remaja". Pada awalnya tempat belajar sekolah Rahmah mengambil tempat di Serambi Mesjid Pasar Usang (sekarang Mesjid Asliyah) yang letaknya berseberangan dengan rumah Rahmah di Jalan Lubuk Mata Kucing (sekarang Jalan Abdul Hamid Hakim). Dalam perkembangan selanjutnya Rahmah berhasil menyewa sebuah ruko bertingkat dua untuk dijadikan tempat belajar di bagian bawah dan asrama di bagian atas. Setelah itu, ia berhasil mendirikan gedung sendiri atas dana dari hasil perjalanannya ke kota-kota di Nusantara dan Malaysia (Ajisman,2002:45).

b. Perkembangan Kurikulum Diniyyah Putri Padang Panjang (1923-1937)

1. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1923

Kurikulum Mata Pelajaran Diniyyah School Putri Padang Panjang meliputi Fiqhi, Tafsir, Tauhid, Sharaf, Nahu, Adab dan Hadits di kelas 1 dan 2.

2. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1925

Pada periode 1925-1927 kurikulum di Diniyyah Putri Padang Panjang semakin berkembang seperti Fiqhi, Hadits, Hikmah Tasyri', Nahi, Sharaf, Tarikh Islam, Tauhid, Adab, Tafsir dan Menulis (Khath) di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Sampai tahun kelima berdirinya perguruan ini titik berat mata pelajaran diutamakan ke pada agama dan bahasa Arab seperti yang digambarkan oleh mata-mata pelajaran yang terdapat pada dua periode di atas. Hanya baru 52% dimasukkan mata pelajaran umum yaitu mata pelajaran menulis, pada tahun 1925, karena pada periode ini pelajar-pelajarnya terdiri sebagian besar dari kaum ibu yang telah berumah tangga. Tahun 1926 tidak lagi menerima pelajar putri yang telah berumah tangga, tapi betul-betul anak perempuan yang belum pernah bersekolah.

3. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1928

Selanjutnya, Kurikulum Diniyyah Putri Padang Panjang Periode 1928-1930 semakin berkembang bahkan di ajarkan di 6 kelas seperti: Fiqhi, Tafsir, Tauhid, Hikmah Tasyri', Adab, Hadits, Nahu, Sharaf, Ilmu Bumi, Ushul Fiqhi, Arudh, Tarikh Islam dan Menulis (Kath) latin.

Mulai tahun ini telah dimasukkan 10% mata pelajaran umum yaitu menulis dan ilmu bumi. Kedua mata pelajaran ini telah diajarkan sejak kelas satu sampai kelas terakhir.

4. Kurikulum Diniyyah Putri tahun 1931-1937

Pada periode 1931-1937 kurikulum diniyyah putri tidak hanya ada di Madrasah Ibtidaiyah, karena semakin berkembangnya pendidikan pada masa itu Diniyyah Putri Padang Panjang juga memiliki Madrasah Tsanawiyah. matapelajarannya mencakup Fiqhi & H.Tasryi', Tafsir, Hadits, Tauhid, Muthala'ah, Muhadatsah, Insyah, Imla', Qawa'id, Mahluzat, Akhlak, Staatsrecht, I.Kesehatan, Bahasa Inggris, Pokok-pokok I.Hayat, Ilmu Bumi, Menggambar, Berhitung, Tarikh Islam, Ushul Fiqhi, Khath, Sejarah Agama-agama, Ilmu Jiwa dan Pendidikan.

5. Periode-periode selanjutnya

Pada periode 1938-1945 kurikulum Diniyyah Puteri Padang panjang meliputi matapelajaran Agama, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Menulis Latin, Berhitung, I.Kesehatan, Bernyanyi, Ilmu Bumi, Menggambar, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Binatang, Ilmu T.Manusia, Ilmu Alam, Bahasa Belanda, Tarikh Islam, Sejarah Umum, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Pekerjaan Tangan, Hitung Dagang, Pegang Buku, Manthiq dan Ma'ani (*Balaghah*).

Mulai tahun ajaran 1938 ini kurikulum Perguruan Diniyah Putri ini mengalami perkembangan yang mendasar, karena hampir 30% -40% mata pelajaran umum diajarkan. Mata pelajaran mata pelajaran agama dan bahasa Arab yang bermacam-macam pada kurikulum sebelum ini dikelompokkan ke dalam mata pelajaran pokok yaitu mata pelajaran agama dan bahasa Arab yang masing-masing antara 18 sampai dengan 20 jam per minggu sedangkan kelompok mata pelajaran umum yang berjumlah 17 macam dipecah-pecah menjadi satu unit beban studi atau mata pelajaran, sehingga kurikulum pada tahun ini mulai sarat frekwensinya yaitu rata-rata 35 jam per minggu, yang sebelum ini hanya antara 22 dan 29 jam perminggu yaitu pada kurikulum tahun ajaran 1931 (Ajisman,2002: 65-67).

c. Tujuan Pendidikan Diniyyah Puteri Padang Panjang

Memperhatikan Landasan Idiel dari cita-cita Almarhumah dapatlah kita simpulkan, bahwa tujuan pendidikan Diniyyah Puteri adalah Membentuk puteri yang berjiwa islam dan ibu Pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan Masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian kepada allah subhanahu wa ta'ala Serta Membentuk Puteri menjadi pribadi yang berjiwa Islam, ini dilaksanakan dalam masa pendidikan 3 tahun pertama (Aminuddin Rasyad, dkk, 1991:1).

Setelah jiwa mereka ditempa untuk menjadi seorang muslimah yang berakhlak mulia, berkepribadian Islam, pada 3 tahun berikutnya kepada mereka lalu diberikan pendidikan untuk membentuk mereka menjadi Ibu Pendidik yang mencakup tiga pengertian, yaitu :

1. Pengertian primair, adalah Ibu Pendidik dalam rumah tangga (sesuai dengan fitrah wanita itu menjadi ibu rumah tangga).
2. Pengertian secundair, ialah Ibu Pendidik bagi murid-muridnya di sekolah (bagimereka yang berbakat menjadi guru).
3. Pengertian tertiar, ialah Ibu Pendidik dalam masyarakat, yaitu menjadi pemimpin wanita (dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial) dan menjadi muballighat atau da'iyat.

Sebagai melengkapi ketiga macam pengertian Tujuan Pendidikan Diniyyah Puteri ini, kepada murid-murid juga diberikan pendidikan keterampilan dan ilmu kemasyarakatan serta ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat menunjang keikutsertaan mereka bertanggung jawab bagi terlaksananya kesejahteraan dalam masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tanah airnya selaku warga negara yang baik. Semuanya harus dengan motivasi yang didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT., bukan karena mengharapkan apa-apa dari sesama manusia, melainkan karena Allah semata. Puteri-puteri yang berkerpiadian demikianlah yang dicita-citakan oleh Almarhumah Rahmah El Yunusiyah.

d. Sistem Pendidikan Diniyyah Puteri Padang Panjang

Adapun sistem pendidikan lembaga pendidikan ini adalah sistem Tritunggal, yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama dan rumah tangga atau masyarakat (Aminuddin Rasyad, 1991:2). Terjadinya kerjasama yang erat antara ketiga unsur dari sistem pendidikan pada perguruan ini akan sangat membantu untuk membentuk anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di perguruan ini.

Ini berarti bahwa pendidikan formal yang diberikan di perguruan pada pagi hari, secara informal dipraktekkan di asrama di bawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh yang seluruhnya adalah wanita. Apabila pelajar-pelajar pulang ke rumah orang tua atau kampung halamannya, maka semua materi pendidikan yang diterima oleh pelajar selama mereka berada di perguruan ini, akan dipraktekkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya di bawah pengamatan orang tuanya masing-masing, sehingga dapat dilihat apakah cita-cita pendidikan di perguruan ini dapat direalisasi dan dipraktekkan oleh para pelajar dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum meninggalkan anak-anak mereka di asrama Diniyyah Puteri, kepada para wali murid tersebut telah diberikan pengarahan mengenai pentingnya kerja sama perguruan dengan orang tua murid dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, supaya sistem yang ditargetkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan perguruan dapat dilaksanakan secara baik dan memenuhi keinginan tidak hanya sekedar tertulis di atas kertas saja (Aminuddin Rasyad, 1991: 1)

#### IV. KESIMPULAN

Pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda terkhususnya di daerah Minangkabau, tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pribumi. Setelah diberlakukannya politik etis, masyarakat pribumi mendapatkan pendidikan. Politik etis memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Dengan dimulainya kebijakan politik etis ini memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan. Dengan begitu mulailah muncul beberapa kaum elit pribumi.

Politik etis yang dicanangkan sebagai politik balas budi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak untuk pribumi, namun di dalam pelaksanaannya ini sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang menjadi tujuan awalnya yaitu di dalam pelaksanaan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat pribumi. Masih banyak yang namanya diskriminasi terhadap kaum pribumi sehingga yang merasakan pendidikan pun masih terbatas.

Adanya politik etis juga merubah pandangan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di Minangkabau. Kegiatan perempuan dulunya hanya terbatas untuk di rumah dan mendidik anak saja, ketika lahirnya politik etis mulai memberikan kesempatan bagi perempuan untuk juga merasakan pendidikan. Di Minangkabau dengan kekuatan adat yang sangat kuat memberikan keterbatasan pada fungsi perempuan itu sendiri, yang menjadikan perempuan sebagai pendidik anak dan yang mengurus rumah sehingga tugas perempuan lebih banyak di rumah. Sehingga, pada era Politik Etis ini merubah pandangan masyarakat bahwasannya pendidikan itu tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan.

#### REFERENSI

- Abdullah, N. (2015). Rahmah El Yunusiyah Kartini Padang Panjang (1900-1969) [Jurnal]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Agus, dkk. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal Historia*, ISSN 2337-4713.
- Ahmad Wahyudi, W. (2015). Perempuan Minangkabau dari Konsepsi Ideal-Tradisional, Modernisasi, sampai Kehilangan Identitas. Komunitas Jejak Pena.
- Ajisman, dkk. (2002). Rahmah El Yunus Tokoh Pembaharuan dan aktivis Perempuan di Sumatera Barat. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Alinur. (2012). Politik Etis Pada Masa Kolonialisme Belanda Di Indonesia. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Anwar, S. (2001). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Asnan, G., dkk. (2013). Adabiah Perintis Pendidikan Modern di Sumatera Barat. Penerbit Ombal.
- Azwar, S. (2010). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset.
- Cholid, dkk. (2009). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara.
- Derakhmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik. Tarsito.

- Fansuri Mursal, I. (2018). Surau Dan Sekolah; Dualisme Pendidikan Di Bukittinggi 1901-1942. *Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2(1).
- Frenkel, dkk. (2007). *How to Design and Evaluate Reserch in Education*. MC Graw Hill.
- Gazal. (2015). *Madrasah Tarbiyah Islamiyah: Benteng Sunni di Minangkabau*. Jurnal IAIN Bukittinggi.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Kusmayadi, Y. (2017). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942*. Jurnal Universitas Galuh Ciamis.
- Locher Scholten, E. (1996). *Etika yang Berkeping-keping*. Djambatan.
- Makmur, D., dkk. (Tahun tidak disebut). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajah. Proyek Invertarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional*.
- Marta, Y.R. (2017). *Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad XX*. Jurnal STKIP PGRI Lubuk Linggau.
- Martamim, M., dkk. (1997). *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Marwati, dkk. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*. Balai Pustaka.
- Mestoko, S. (1979). *Pendidikan di Indonesia Dari Zaman ke Zaman*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mirzaqon, dkk. (Tahun tidak disebut). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*.
- Musri, M. (2015). *Zainuddin Labay El-Yunusy- Akar-akar Historis Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau Awal Abad XX*. Imam Bonjol Press.
- Nasution, M.I.S., Lubis, H.S.D, & Tanjung, Y. (2022). *Rahmah El Yunusiyah: Tokoh Pembaharuan Pendidikan di Kalangan Perempuan Minangkabau, 1923-1969*. MUKADIMAH: *Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 277–284.
- Ikhwan, N.G. (Tahun tidak disebut). *Kiprah Rohana Kuddus Dalam Memajukan Kaum Perempuan Di Minangkabau Tahun 1911-1921*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurkholis. (2013). *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1.
- Oktavianuri, D. (2018). *Politik Etis dan Pergerakan Nasional*. Derwati Press.
- Peringatan 55 Tahun Dininiyyah Putri Padang Panjang. (1978). *Ghalia Indonesia*.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. ArRuzz Media.
- Putri, A. M. (2022). *Perkembangan Kolonisasi Giesting Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Pada Tahun 1926-1942*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Rahman, R. (Tahun tidak disebut). *Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad 20 (Studi Kasus di Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang.
- Refisrul, R., & Ajisman, A. (2015). *Minangkabau dan Kerinci: Hubungan budaya dan sistem kekerabatan*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Remiswal, R., Fajri, S., & Putri, R. (2021). *Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan*. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 71–77.

Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra